

ABSTRAK

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi aspek krusial dalam menjaga kualitas demokrasi, khususnya pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pengaturan netralitas ASN serta implementasinya dalam konteks lokal Kota Tasikmalaya. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan prinsip fundamental dalam menjamin kualitas demokrasi dan integritas birokrasi, khususnya dalam kontestasi politik lokal seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep pengaturan netralitas ASN serta implementasinya pada Pilkada Kota Tasikmalaya tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi netralitas ASN telah diatur dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, serta SKB lima lembaga terkait netralitas ASN, namun pelaksanaannya di Kota Tasikmalaya masih menghadapi berbagai kendala.

Permasalahan utama terletak pada rendahnya pemahaman ASN terhadap aturan netralitas, lemahnya sistem pengawasan dan penindakan. Penelitian ini juga menemukan bahwa belum adanya regulasi teknis di tingkat daerah serta minimnya sinergi antar lembaga pengawas menghambat upaya penguatan netralitas ASN. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan kapasitas ASN, pembentukan peraturan teknis daerah, dan penguatan sistem pengawasan berbasis kolaboratif. Dengan demikian, pengaturan netralitas ASN diharapkan tidak hanya menjadi formalitas hukum semata, melainkan menjadi praktik yang melekat dalam budaya birokrasi yang profesional dan demokratis.

Kata Kunci: Netralitas ASN, Pilkada 2024, Kota Tasikmalaya, Pengawasan.

ABSTRACT

The neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) is a crucial aspect in maintaining the quality of democracy, especially in the implementation of the 2024 simultaneous regional elections in Tasikmalaya City. This study aims to examine the concept of ASN neutrality regulation and its implementation in the local context of Tasikmalaya City. The neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) is a fundamental principle in ensuring the quality of democracy and bureaucratic integrity, especially in local political contests such as the Regional Head Election (Pilkada). This research aims to analyze in depth the concept of ASN neutrality regulation and its implementation in the 2024 Tasikmalaya City Regional Elections. The research method used is qualitative descriptive with data collection techniques through interviews, documentation studies, and observations. The results of the study show that although ASN neutrality regulations have been regulated in various regulations such as Law Number 5 of 2014 concerning ASN, Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline, and the Decree of five institutions related to ASN neutrality, its implementation in Tasikmalaya City still faces various obstacles.

The main problem lies in the low understanding of civil servants of the rules of neutrality, weak supervision and enforcement systems. This study also found that the absence of technical regulations at the regional level and the lack of synergy between supervisory institutions hampered efforts to strengthen the neutrality of ASN. Based on these findings, strategic steps are needed in the form of increasing the capacity of ASN, establishing regional technical regulations, and strengthening a collaborative-based supervision system. Thus, the regulation of ASN neutrality is expected not only to be a legal formality, but also to become an inherent practice in a professional and democratic bureaucratic culture.

Keywords: *ASN Neutrality, 2024 Regional Elections, Tasikmalaya City, Supervision.*